



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 33749, 33180, 40302, 40307 Fax. (0761) 33477

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

PENGUMUMAN

Nomor : 800/BKD/1391

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 2022 Tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tanggal 7 Juni 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Provinsi Riau akan melaksanakan seleksi penerimaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI, UNIT PENEMPATAN DAN MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (MHPK)

(Daftar Terlampir)

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari Perguruan Tinggi yang **Terakreditasi** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
10. Pelamar wajib melampirkan Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

11. Pelamar wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan.
12. Terdapat jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis (**Daftar Jenis Jabatan Fungsional terlampir sesuai Keputusan MenpanRB Nomor 970 Tahun 2022**);
13. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan jabatan pada tahun anggaran yang sama pelaksanaan seleksi;
14. Pelamar yang diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan atau menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. Untuk mengikuti seleksi PPPK Tahun 2022, pelamar **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
16. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi PPPK Tahun 2022 hanya dapat dilihat pada laman <http://www.bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.riau.go.id>;
17. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada angka 16 (enam belas) untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.

III. PERSYARATAN KHUSUS

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
 1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mencantumkan *link* videonya pada aplikasi SSCASN (pelamar terlebih dahulu mengunggah file video pada *Google Drive*, *Dropbox* atau media penyimpanan daring lainnya).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamaran dilakukan secara daring melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> dengan terlebih dahulu membuat akun, dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) Elektronik/Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK);
2. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <http://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. Scan Surat lamaran Asli yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital dan ditandatangani di atas materai Rp10.000,- ditujukan Kepada Gubernur Riau di Pekanbaru (**format terlampir**);
 - b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Asli;

- c. Scan Ijazah Asli dan Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT bagi tamatan Perguruan Tinggi / Ijazah Asli bagi tamatan SLTA sederajat;
- d. Scan Transkrip Nilai Asli bagi tamatan Perguruan Tinggi / STTB Asli bagi tamatan SLTA sederajat;
- e. Soft copy pas foto terbaru berlatar belakang warna merah;
- f. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan (Scan Sertifikat Kompetensi);
- g. Scan Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain sesuai ketentuan persyaratan umum yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,- oleh calon pelamar (**format terlampir**).

V. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan seleksi meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi.

VI. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja ditetapkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;
2. Perpanjangan hubungan perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK didasarkan pada pencapaian/penilaian kinerja, kesesuaian kompetensi dan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK.

VII. KETENTUAN LAIN

Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2022 dapat menghubungi:

1. Helpdesk No. WhatsApp 082170314660 pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
2. Email: bkd@riau.go.id pada hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Pekanbaru, 21 Desember 2022

a.n. GUBERNUR RIAU

Sekretaris Daerah,

Selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Pemerintah Provinsi Riau



Ir. S.F. HARIYANTO, MT

Pembina Utama

NIP: 196504301987111001

LAMPIRAN 1 PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 800/BKD/ 1391

TANGGAL : 21 DESEMBER 2022

JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, ALOKASI, UNIT PENEMPATAN DAN MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA (MHPK)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	MHPK	KETERANGAN
1	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPHP MODEL MINAS TAHURA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
2	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BAGAN SIAPI API, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
3	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BAGAN SIAPI API, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
4	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BAGAN SIAPI API, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
5	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH KAMPAR KIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
6	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SINGINGI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
7	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SULIGI - BATU GAJAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

8	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SULIGI - BATU GAJAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
9	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SULIGI - BATU GAJAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
10	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SULIGI - BATU GAJAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
11	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SULIGI - BATU GAJAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
12	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SULIGI - BATU GAJAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
13	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH INDRAGIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
14	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPHP MODEL MINAS TAHURA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
15	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPHP MODEL MINAS TAHURA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
16	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPHP MODEL MINAS TAHURA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

17	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPHP MODEL MINAS TAHURA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
18	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPHP MODEL MINAS TAHURA, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
19	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH ROKAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
20	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH ROKAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
21	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR (*)	S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELETRO	6	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA WILAYAH III, KEPALA SEKSI PELATIHAN	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
22	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH KAMPAR KIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
23	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH KAMPAR KIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
24	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH KAMPAR KIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
25	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SOREK, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

26	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SOREK, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
27	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SOREK, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
28	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH KAMPAR KIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
29	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER (*)	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PARAMEDIK VETERINER	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT HEWAN, KEPALA SEKSI LABORATORIUM VETERINER	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
30	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BENGKALIS PULAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
31	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BAGAN SIAPI API, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
32	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL TASIK BESAR SERKAP, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
33	AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR (*)	S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 KOMPUTER / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELEKTRO / D-IV KOMPUTER	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, KEPALA BIDANG PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA, KEPALA SEKSI PELATIHAN, PEMAGANGAN DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
34	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BAGAN SIAPI API, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

35	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BAGAN SIAPI API, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
36	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ADMINISTRASI NEGARA	2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD, WAKIL DIREKTUR BIDANG SDM, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDIDIKAN, KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
37	PEMULA - PENGUJI MUTU BARANG (*)	SMK KIMIA	2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEPALA UPT, PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG, KEPALA SEKSI TEKNIS SERTIFIKASI	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
38	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN (*)	S-1 PERTANIAN	4	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPT PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN, KEPALA SEKSI PENYULUHAN	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
39	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH TEBING TINGGI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
40	TERAMPIL - PENGUJI MUTU BARANG (*)	D-III KIMIA	2	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEPALA UPT, PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG, KEPALA SEKSI TEKNIS SERTIFIKASI	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
41	AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG (*)	S-1 TEKNIK MESIN / D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TEKNIK ELEKTRO / D-IV TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK KIMIA / D-IV TEKNIK KIMIA / D-IV TEKNIK FISIKA / S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA / D-IV TEKNIK ELEKTRONIKA	4	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, KEPALA UPT, PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG, KEPALA SEKSI TEKNIS SERTIFIKASI	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
42	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH INDRAGIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
43	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH INDRAGIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

44	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH INDRAGIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
45	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH INDRAGIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
46	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIK / S-1 STATISTIKA	2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
47	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SINGINGI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
48	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SINGINGI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
49	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SINGINGI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
50	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH SINGINGI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
51	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER (*)	D-III KESEHATAN HEWAN / D-III PARAMEDIK VETERINER	1	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU, KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT HEWAN, KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIK VETERINER	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
52	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

53	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
54	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
55	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
56	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAH, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
57	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH KAMPAR KIRI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
58	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH TEBING TINGGI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
59	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH TEBING TINGGI, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
60	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BENGKALIS PULAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
61	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BENGKALIS PULAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

62	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BENGKALIS PULAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
63	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BENGKALIS PULAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
64	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH BENGKALIS PULAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
65	PEMULA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGU TUMBUHAN (*)	SMK PERTANIAN / SPP SPMA / SMTP / SPMA	12	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPT PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA SEKSI PENGENDALIAN	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
66	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH ROKAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
67	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH ROKAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
68	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH ROKAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
69	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH ROKAN, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
70	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL TASIK BESAR SERKAP, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

71	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL TASIK BESAR SERKAP, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
72	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL TASIK BESAR SERKAP, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
73	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL TASIK BESAR SERKAP, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
74	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL TASIK BESAR SERKAP, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
75	TERAMPIL - PENGAWAS BENIH TANAMAN (*)	D-III PERTANIAN	12	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, KEPALA UPT PEMBENIHAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
76	TERAMPIL - PENYULUH KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN / D-III PERTANIAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
77	PEMULA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
78	AHLI PERTAMA - POLISI KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN / S-1 HUKUM	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
79	AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN (*)	S-1 KEHUTANAN	2	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS

80	PEMULA - POLISI KEHUTANAN (*)	SMK KEHUTANAN	6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
81	TERAMPIL - POLISI KEHUTANAN (*)	D-III KEHUTANAN	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, KEPALA UPT KPH MANDAU, KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	2	BISA DILAMAR UMUM DAN DISABILITAS
TOTAL			223			

Catatan

**Tanda (*) pada kolom jabatan adalah jabatan
beresiko tinggi**

Pekanbaru, ~~21~~ Desember 2022

a.n. GUBERNUR RIAU

Sekretaris Daerah,

Selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
Pemerintah Provinsi Riau

dto

Ir. S.F. HARIYANTO, MT

Pembina Utama

NIP. 196504301987111001

LAMPIRAN 2 : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI RIAU TENTANG PELAKSANAAN
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/BKD/1391
TANGGAL : 21 DESEMBER 2022

CONTOH SURAT LAMARAN PESERTA PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS (TULISAN TANGAN)
PEKANBARU, 2022
KEPADA YTH :
GUBERNUR RIAU
DI -
PEKANBARU

PERIHAL : PERMOHONAN LAMARAN PPPK
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
An.....

DENGAN HORMAT,
YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
ALAMAT :
NOMOR TELEPON/HP :
EMAIL :
JABATAN YANG DILAMAR :
PENDIDIKAN :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
TEKNIS PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2022, DENGAN KELENGKAPAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT :

1. FOTOKOPI IJAZAH DAN SERTIFIKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DARI BAN-PT, TRANSKIP NILAI YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH REKTOR / DEKAN / KETUA / DIREKTUR BAGI UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI / AKADEMI / POLITEKNIK, DENGAN STEMPEL BASAH DAN BUKAN STEMPEL FOTOKOPI (UNTUK PELAMAR SLTA SEDERAJAT FOTOCOPY IJAZAH DAN STTB YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG);
2. PAS PHOTO WARNA BERLATAR BELAKANG MERAH UKURAN 3 X 4 SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR DAN UKURAN 4 X 6 SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR;
3. FOTOKOPI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)/SURAT KETERANGAN (SUKET) TENTANG DATA DIRI DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG MASIH BERLAKU YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG;
4. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DI HUKUM PENJARA, DAN LAIN-LAIN YANG DITANDATANGANI DI ATAS MATERAI RP. 10.000,- OLEH CALON PELAMAR;
5. PELAMAR MELAMPIRKAN PENGALAMAN PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG DILAMAR UNTUK JENJANG PEMULA, TERAMPIL DAN AHLI PERTAMA, YANG DIBUKTIKAN DENGAN SURAT KETERANGAN YANG DITANDATANGANI OLEH:
 - a. PALING RENDAH PEJABAT PEMIMPIN TINGGI PRATAMA, BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI PENGALAMAN BEKERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH;
 - b. PALING RENDAH DIREKTUR/KEPALA DIVISI YANG MEMBIDANGI SUMBER DAYA MANUSIA (*HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT*), BAGI PELAMAR YANG MEMILIKI PENGALAMAN BEKERJA PADA PERUSAHAAN SWASTA/LEMBAGA SWADAYA NON PEMERINTAH/YAYASAN.
6. BAGI PELAMAR PENYANDANG DISABILITAS, WAJIB MELAMPIRKAN SURAT KETERANGAN DOKTER DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKEMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASANNYA;
7. PADA JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI, MELAMPIRKAN FOTOKOPI YANG DISAHKAN/DILEGALISIR OLEH PEJABAT YANG BERWENANG.

DEMIKIAN PERMOHONAN INI SAYA SAMPAIKAN, ATAS PERKENAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,
MATERAI RP. 10.000,-
.....

LAMPIRAN 3 : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI RIAU TENTANG PELAKSANAAN
SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA
TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 800/BKD/1391
TANGGAL : 21 DESEMBER 2022

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DI HUKUM PENJARA DAN LAIN-
LAIN (DI KETIK MENGGUNAKAN KOMPUTER)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Akbar
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 01 Januari 1998
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cut Nyak Dien, No. 50

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Pekanbaru, Desember 2022

Yang membuat pernyataan,

MATERAI RP. 10.000,-

M. Akbar

LAMPIRAN 4 : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
 PROVINSI RIAU TENTANG PELAKSANAAN
 SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
 PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK
 JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
 RIAU TAHUN ANGGARAN 2022
 NOMOR : 800/BKD/ 391
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2022

JADWAL SELEKSI PPPK TENAGA TEKNIS

NO.	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	20 Desember 2022 s.d 3 Januari 2023
2	Pendaftaran Seleksi	21 Desember 2022 s.d 6 Januari 2023
3	Seleksi Administrasi	21 Desember 2022 s.d 11 Januari 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	12 s.d 15 Januari 2023
5	Masa Sanggah	16 s.d 18 Januari 2023
6	Jawab Sanggah	19 s.d 25 Januari 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	26 s.d 28 Januari 2023
8	Pemilihan Titik Lokasi Ujian dan Pencetakan Kartu Peserta	18 s.d 22 Februari 2023
9	Penarikan data final	23 s.d 24 Februari 2023
10	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	25 Februari s.d 1 Maret 2023
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi	2 s.d 7 Maret 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	10 Maret s.d 3 April 2023
13	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	20 Maret s.d 6 April 2023
14	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	26 Maret s.d 8 April 2023
15	Pengumuman Kelulusan	9 s.d 11 April 2023
16	Masa Sanggah	12 s.d 14 April 2023
17	Jawab Sanggah	14 s.d 20 April 2023
18	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	27 s.d 29 April 2023
19	Pengisian DRH NI PPPK	30 April s.d 22 Mei 2023
20	Usul Penetapan NI PPPK	23 Mei s.d 20 Juni 2023

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkd.riau.go.id>.

Pekanbaru, 21 Desember 2022

a.n. GUBERNUR RIAU

Sekretaris Daerah,

Selaku

Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK
 Pemerintah Provinsi Riau

dto

Ir. S.F. HARIYANTO, MT

Pembina Utama

NIP. 196504301987111001